

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR INDIA DAN IRAN

Aldino Yoshitomo¹
Nim.1002045053

Abstract

Changes in United States behavior toward Iran's nuclear program have raised suspicions of double-standard politics in which on contrary to United States policy towards India's nuclear program. In which Iran is a member country of the NPT, whereas India are not a part of NPT. This studies aims to understand the reason behind United States foreign policy which had favored India's nuclear program than Iran's. The results from these studies showed that there are several reasons to the United States disapproval regarding Iranian nuclear program because of terrorism issues and seemingly approached India for the sake of United States hegemony in Asia.

Keywords: *Double Standard, United States, Iran.*

Pendahuluan

Awal mula Iran memiliki energi nuklir dimulai sejak tahun 1950-an pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlevi dengan bantuan dari Amerika Serikat dalam sebuah program reformasi dan modernisasi sosial dan ekonomi yang bernama *White Revolution* atau Revolusi Putih. Revolusi ini tentu mendapatkan perlawanan dari gerakan oposisi penentang Shah Reza Pahlevi yang kritis terhadap reformasi tersebut. Namun, pihak oposisi tidak bisa berbuat banyak karna Shah Reza Pahlevi dilindungi oleh satuan polisis rahasia yang di bentuk oleh Shah dan CIA dari Amerika Serikat bernama SAVAK (*Organization of Intelligence and National Security*).

Tujuan awal pengembangan program nuklir ini adalah untuk membuka pintu investasi Amerika Serikat di Iran dalam bidang industri nuklir sipil perawatan kesehatan dan obat-obatan. Program pengembangan nuklir ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat berupa program atom untuk tujuan damai (*U.S. Atoms for Peace*). Instalasi nuklir pertama Iran ditujukan untuk riset nuklir dengan kekuatan hanya lima megawatt, yang diperoleh dari Amerika Serikat. Kegiatan ini mulai beroperasi pada tahun 1967 ketika didirikannya pusat penelitian tenaga nuklir Tehran *Tehran Nuclear Research Center (TNRC)* dibawah pengawasan organisasi energi atom Iran atau *Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)*.

Untuk memperoleh kepercayaan dunia akan program nuklir tujuan damainya, pada tahun 1968 Iran menandatangani perjanjian *Non Proliferation Treaty (NPT)*, yang

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email : yoshiaja120592@gmail.com

intinya adalah untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata serta mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Selain melakukan perjanjian NPT, Iran juga melakukan kesepakatan untuk keamanan pengembangan nuklirnya dengan IAEA pada tahun 1974 juga melengkapi protocol tambahan untuk perjanjian *Safeguard* nuklirnya.

Berbeda dengan Iran, dimasa Perang Dingin, hubungan Amerika – India dianggap kurang baik, ini dikarenakan India lebih memilih untuk membeli persenjataan dari Uni Soviet dan juga karena rezim ekonomi yang berkuasa pada saat itu condong bersifat *Pseudo-Sosialist* akibatnya Amerika lebih condong ke Pakistan pada masa tersebut. Namun ketika Cina mulai tumbuh sebagai poros kekuatan baru dunia, pemerintah pada masa George W. Bush memutuskan menarik India untuk lebih berpihak pada Amerika sebagai upaya untuk menahan agresi Cina. Presiden Bush kemudian menawarkan teknologi nuklir sipil, akses untuk uranium yang merupakan *Nuclear Power Reactor Fuel*. India kemudian setuju atas penandatanganan 123 Perjanjian atau *U.S – India Civil Nuclear Agreement* yang menuai kontra dari pihak oposisi dari dalam India sendiri (Amital Etzoini, 2012). Sebelum terpilihnya Perdana Menteri India yang baru, Narendra Modi, banyak aktor politik India menganggap Amerika sebagai sekutu Pakistan, Kemudian berubah pada masa awal pemerintahan Narendra Modi yang terlihat mencemaskan negara Cina yang mulai tumbuh sebagai poros kekuatan baru di Asia dan oleh karenanya lebih terlihat *cooperative* terhadap pemerintah Amerika Serikat.

Pada dekade 70an India sudah mempunyai kapasitas energi nuklir dan pada tahun 1974an untuk pertama kalinya India melakukan serangkaian uji coba pada nuklirnya, pada saat itu India mendapat berbagai macam kritik dan sanksi salah satunya adalah embargo ekonomi dari Amerika Serikat karena pada saat itu India merupakan negara yang menolak untuk menandatangani perjanjian non proliferasi nuklir(Akhilesh Pillalamarri, 2008). Namun pada masa pemerintahan Presiden George W Bush, hubungan diplomasi Amerika Serikat dan India menemukan titik terang dimana pada tanggal 2 Maret 2006 di New Delhi terjadi penandatanganan perjanjian nuklir Amerika Serikat dan India, pertemuan ini adalah lanjutan dari penandatanganan perjanjian serupa pada tanggal 18 Juli 2005 di Washington, perjanjian nuklir tersebut dinilai sebagai langkah baru kebijakan Amerika Serikat di Asia, untuk pertama kalinya Amerika Serikat memperbolehkan negara seperti India yang dahulu sempat memiliki hubungan bilateral yang renggang untuk melakukan kesepakatan pengembangan program nuklir.

Pada Agustus 2016 ini, India dan Amerika Serikat telah setuju terhadap penandatanganan perjanjian kerjasama dibidang pertahanan logistik, LEMOA atau *Logistic Exchange Memorandum of Agreement* yang berarti India dan Amerika Serikat akan saling berbagi fasilitas *refueling, spare parts, and supplies*. Hal ini akan sangat membantu Amerika Serikat untuk menahan agresi kekuasaan Cina.

Amerika Serikat lebih menilai pengembangan program nuklir Iran sebagai langkah awal untuk mengembangkan senjata nuklir dan keperluan bidang militer, kecurigaan Amerika Serikat ini dimulai pada tahun 1979 pada saat kejatuhan Shah Reza Pahlevi atas kejadian *Islamic revolution* dan putusnya kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dan Iran dalam pengembangan teknologi nuklir, serta dilandasi oleh pemikiran

bahwa Iran merupakan salah satu negara pendukung gerakan terorisme di dunia, semenjak masa pemerintahan George W. Bush dan Barrack Obama, Amerika Serikat sering memberikan sanksi dan embargo bagi Iran. Berbeda dengan India, Amerika Serikat mendukung program penambahan kapasitas reaktor pembangkit energi tenaga nuklir di India.

Dengan kesepakatan program nuklir tahun 2008 (*U.S – India Civil Nuclear Agreement*), Amerika Serikat membantu India dalam pengembangan lebih jauh energi nuklir untuk tujuan damai dengan membantu melengkapi pasokan energi nuklir terhadap India, dengan melakukan lobi terhadap negara-negara penyuplai nuklir yang tergabung dalam *Nuclear Suppliers Group* (NSG) untuk menyuplai kebutuhan bahan baku reaktor nuklir India. Amerika Serikat juga menegaskan bahwa India harus mengizinkan badan energi atom internasional atau *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk memeriksa lebih banyak reaktor nuklir yang dimiliki India agar tidak di salah gunakan. Kesepakatan ini disetujui walaupun India tidak menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) ataupun *Comprehensive Test-Ban Treaty* (CTBT) (Rupakyioti Borah, 2011).

Pada tahun 2005 tersebut Amerika Serikat mulai terlihat menerapkan sikap standar gandanya, dimana pada Juli tahun 2005 Amerika secara resmi telah menyetujui India sebagai negara dengan teknologi nuklir maju (*Advanced-Nuclear Tech Nations*) serta presiden AS saat itu, George W. Bush telah setuju untuk melakukan kerjasama nuklir dengan India. Sedangkan Iran sudah menyepakati perjanjian nuklir tujuan damai NPT sejak tahun 1968 namun kerap mendapatkan kecaman dan sanksi dari pemerintah AS, hal ini menampilkan sikap standar ganda Amerika Serikat yang menimbulkan pertanyaan besar karena Amerika Serikat sendiri yang memberikan bantuan ke India yang bukanlah salah satu negara penandatangan NPT, dan terlebih AS juga yang menuduh bahwa program nuklir Iran digunakan untuk tujuan militer.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari Yunani Kuno yang mana hegemoni secara harfiah dapat berarti sebuah bentuk dominasi atau tindakan menekan suatu elemen tertentu yang ada dalam sebuah sistem.

Joseph S. Nye berpendapat bahwa sebuah negara superior menjadi hegemon dengan melakukan tindakan persuasif agar negara lain mau berkerjasama. Persuasi dilakukan dengan menggunakan “*Soft Power*” untuk menyakinkan negara lain adanya kesamaan kepentingan (*Common Interest*). Namun menurut Robert O Keohane, negara-negara adidaya memperoleh posisi mereka secara unilateral dengan menggunakan *Hard Power* namun tetap dengan meminta persetujuan yang meyakinkan (Joseph S Nye, 1997:195). Hegemoni menciptakan atau mempertahankan rezim kritis untuk bekerjasama dimasa depan, dan mengurangi hal-hal yang tidak pasti yang dapat merugikan, sementara negara-negara lain mengejar kepentingan mereka masing-masing.

Terdapat pemahaman umum pada zaman modern ini berkaitan dengan unsur-unsur kekuasaan hegemon seperti; nilai mata uang efektif pada kawasan internasional,

komposisi militer yang besar dengan membentuk persekutuan dan pangkalan militer di setiap belahan dunia, kepemimpinan dalam krisis dan konflik regional, mempertahankan kepemilikan senjata nuklir, kapabilitas dalam melakukan persuasi atas negara-negara lain, legitimasi status dengan menyebarkan standar kehidupan negara sendiri dan nilai-nilai budaya di seluruh dunia.

Dalam hegemoni terdapat beberapa elemen sumber kekuasaan. Pencetus konsep “*soft power*” Joseph S. Nye membuat daftar sumber kekuatan hegemonik sebagai berikut:

1. *Technological leadership,*
2. *Supremacy in military and economy,*
3. *Soft power,*
4. *Control of the connection points of international communication lines.*

Menurut Nye, negara harus mengembangkan beberapa kapasitas dibawah ini untuk memiliki soft power di era informasi, yaitu :

- 1 Budaya dan ide-ide yang memiliki kemiripan dengan norma-norma global (seperti liberalisme, pluralisme, otonomi)
- 2 Agenda komunikasi global yang memiliki pengaruh
- 3 *Global prestige with own domestic and international performance.*

Adapun dalam pemahaman ekonomi-politik internasional, negara yang memiliki unsur-unsur dibawah ini dianggap adalah yang paling kuat;

- 1 Mempertahankan kemampuan untuk mempengaruhi negara-negara lain melalui ancaman, pertahanan, penolakan atau eskalasi kekerasan.
- 2 Mampu mengendalikan dan menjaga sistem produksi barang dan jasa.
- 3 Memiliki Kewenangan dalam menentukan dan memajemen di bidang keuangan dan lembaga kredit.
- 4 Mempertahankan instrumen yang paling efektif untuk mempengaruhi pengetahuan (*Knowledge*) dan informatika (*Informatics*) baik secara teknis (direncanakan) maupun tidak , melalui produksi, maupun komunikasi.

Berdasarkan pemahaman diatas hegemoni dalam kaitannya dengan perpolitikan antar negara dapat diartikan sebagai kemampuan negara A untuk (*power to*) mengubah tindakanan negara B atau kekuasaan atas (*power over*) suatu negara untuk mengintegrasikan kepentingan negara A atau memaksakan ideologinya terhadap negara B agar sama dengan kepentingan dan kehendak negara A baik dengan berbagai tindakan seperti persuasif, perjanjian, kerjasama, tekanan ekonomi-politik, berbagai bentuk *soft power* ataupun *hard power*.

Amerika Serikat sebagai aktor politik global yang punya kemampuan untuk menarik India untuk bekerja sama dengan Amerika dengan penawaran lebih jauh pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai namun di lain sisi AS juga menggunakan kekuatannya sebagai aktor politik global menuding pengembangan nuklir Iran sebagai pengembangan untuk tujuan militer dan sering memberikan sanksi dan embargo kepada Iran.

Konsep Politik Standar Ganda

Politik standar ganda merupakan prediksi standar ganda terhadap tindakan suatu politik, standar ganda itu sendiri secara bahasa berarti penerapan kumpulan prinsip

yang berbeda untuk situasi yang sama. Politik standar ganda atau *double standart politics* secara harfiah merupakan cara berpolitik yang oportunis dengan mengungkapkan dua hal yang berlainan terhadap dua pihak yang berlawanan, demi keuntungan pihak tersebut sendiri.

Tujuan standar ganda jika melihat analisis David Runciman pada intinya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari implementasi kebijakan yang bertolak belakang dengan yang dijanjikan sebelumnya. Contoh sederhana ialah ketika suatu pihak berkomitmen untuk melakukan tindakan A namun melakukan tindakan B, atau berkampanye untuk tidak melakukan X namun melakukan atau mengimplementasikan X ketika telah atau sedang berkuasa. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemecahan masalah, sebagai jalan keluar dari suatu konflik atau tindak usaha pengambilan kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan kebijakan suatu negara, standar ganda atau yang Runciman sebut sebagai *hypocrite* adalah tindakan aktor-aktor negara untuk mendapatkan kekuasaan atau kemenangan atas lawan, atau sebagai sebuah kebijakan untuk keluar dari permasalahan atau isu yang ada, tanpa adanya penilaian atas baik atau buruk.

Penerapan standar ganda secara sadar dapat membawa keuntungan dalam jangka pendek berupa efek psikologis hingga kemudahan dalam hal-hal praktis. Walaupun begitu, tidak ada pemungkiran bahwa keuntungan tersebut didapat dengan tetap mengorbankan kepentingan orang lain. Pengurangan hak yang diterima obyek politik standar ganda merupakan akibat dari perbuatan tersebut. perilaku standar ganda merupakan sebuah antitesis dari sikap adil. Pada intinya, sikap standar ganda yang cenderung politis menjadi salah satu wujud oportunistik dalam menanggapi dua hal yang serupa.

Jika dilihat lebih rinci, terdapat beberapa indikator yang dapat menentukan sifat atas penerapan standar ganda. Penerapan standar ganda secara sadar dapat membawa keuntungan dalam jangka pendek berupa efek psikologis hingga kemudahan dalam hal-hal praktis. Walaupun begitu, tidak ada pemungkiran bahwa keuntungan tersebut didapat dengan tetap mengorbankan kepentingan orang lain. Pengurangan hak yang diterima obyek politik standar ganda merupakan akibat dari perbuatan tersebut. perilaku standar ganda merupakan sebuah antitesis dari sikap adil. Pada intinya, sikap standar ganda yang cenderung politis menjadi salah satu wujud oportunistik dalam menanggapi dua hal yang serupa.

Dalam buku yang ditulis David Runciman, dijelaskan bahwa permasalahan khusus perpolitikan sekarang ialah bahwa masyarakat liberal telah atau sedang menjadi sebuah bentuk masyarakat yang demokratis. Karena hipokrasi telah menjadi hal yang umum pada masyarakat, para aktor politik memanfaatkan hal ini untuk melakukan politik standar ganda guna mengalahkan lawan untuk merebut kekuasaan dan ataupun menang dalam sebuah pemilihan.

Standar ganda biasanya merujuk kepada ketidakkonsistenan sikap atau kebijakan luar negeri yang dianut dan dijalankan suatu negara. AS sebagai aktor politik global sangat sering dituding memiliki standar ganda dalam implementasi kebijakan luar

negerinya. Di satu sisi muncul sebagai pahlawan demokrasi dunia yang sangat menekankan penerapan hak asasi manusia dan perdamaian. Sementara di lain sisi bersikap semena-mena, intervensionis, dan otoriter dalam memaksakan kepentingannya.

Selain itu, adanya kesepakatan pakta nuklir India-Amerika Serikat juga menjadi salah satu indikator program standar ganda AS lainnya yang sangat bertolak belakang dengan sikap AS terhadap program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif-Eksplanatif untuk menjelaskan alasan AS melakukan politik standar ganda atas kasus nuklir terhadap Iran. Jenis data yang dipakai yaitu jenis data sekunder yaitu data yang berasal dari hasil interpretasi data primer baik berupa buku, artikel dan akses media elektronik. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi literature yaitu mencari dan membaca buku-buku, laporan jurnal, artikel, dan data-data internet baik nasional maupun internasional. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder dan kemudian menggunakan teori sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang diteliti.

Pembahasan

Perdebatan tentang pengembangan nuklir telah menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian besar masyarakat dunia, penggunaan nuklir sendiri terkadang masih menjadi isu sampai saat ini, baik dengan tujuan sebagai sumber tenaga modern alternatif pengganti tenaga *fossil*, maupun sebagai bentuk pengembangan teknologi pertahanan yang masih kontroversial.

Pengembangan nuklir Iran dan kerjasamanya dengan Amerika Serikat sendiri telah lama terjalin. Tetapi, dalam perkembangannya Amerika Serikat terlihat lebih terbuka terhadap pengembangan nuklir oleh India yang menimbulkan perdebatan dikarenakan India pernah menolak untuk menandatangani perjanjian NPT.

Penulis akan menjabarkan secara jelas bahwa perubahan arah kebijakan nuklir Amerika Serikat ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu :

Klaim AS terhadap Iran yang dianggap sebagai Axis of Evil.

Sebagai bentuk pembalasan atas tindakan terorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 atas gedung *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat lalu secara spontan mengkampanyekan kebijakan *war on terrorism* nya keseluruh dunia dan khususnya timur tengah. Irak, Iran dan Afganistan lalu dituduh sebagai negara yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris yang diklaim oleh Amerika Serikat bersalah atas serangan tersebut. *Axis of evil*, merupakan sebuah ungkapan atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara dengan kecenderungan tindakan agresif (*threatening*) atau kecenderungan untuk melakukan perlawanan (*bellicose*). Negara yang pernah dirujuk sebagai *axis of evil* antara lain ialah Cuba, Sudan, Syria, Iran, Korea Utara, dan Irak.

Penggolongan tersebut berkaitan erat dengan perkembangan doktrin keamanan nasional Amerika Serikat pasca serangan teroris pada 11 September 2001, dan juga kampanye perang terhadap teror. Amerika Serikat menganggap negara-negara yang dicurigai memberikan bantuan atau dukungan kepada teroris tidak jauh berbeda dengan teroris itu sendiri. Diantara negara-negara yang diklasifikasikan kedalam *Axis of Evil* adalah Iran.

Sebagai bentuk pembalasan atas tindakan terorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 atas gedung *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat lalu secara spontan mengkampanyekan kebijakan *war on terrorism*-nya keseluruh dunia dan khususnya Timur Tengah. Irak, Iran dan Afganistan lalu dituduh sebagai negara yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris yang diklaim oleh Amerika Serikat bersalah atas serangan tersebut.

Pada 29 Januari 2002, dalam pidato kenegaraannya, Presiden George W. Bush mencap Iran dan "sekutu terorisnya" sebagai bagian dari "poros kejahatan, yang berusaha mengancam perdamaian dunia." Dan pada 31 Januari, Penasehat Keamanan Nasional Condoleezza Rice menyampaikan pandangan amerika terhadap posisi pemerintah Iran. Rice mengatakan bahwa dukungan langsung Iran terhadap terorisme regional dan global, dan usaha agresif untuk mengakuisisi senjata pemusnah massal, serta menginkari niat baik yang telah ditunjukkannya pada waktu setelah serangan teroris terburuk dalam sejarah dunia. Iran disebut-sebut adalah negara sponsor aktifitas kelompok Islam di Lebanon dan Palestina.

Iran diduga dekat Al-Qaida dan diperkirakan memiliki senjata pemusnah massal/*Weapon Of Mass Destruction* (WMD) yang dapat jatuh ke tangan para terduga teroris, sedangkan Afganistan di anggap sebagai markas dan basis utama al-Qaida.

Beberapa analis terkejut dengan masuknya Iran kedalam salah satu target kampanye militer Amerika Serikat. Pada awal kampanye AS di Afghanistan, Iran bersikap santai dalam mengkritik tindakan militer AS tersebut. Terlebih pemerintahan Teheran telah memainkan peran penting di balik layar dalam membantu memperkuat kesepakatan mengenai pemerintah sementara Afghanistan. Namun, kemudian Washington menuduh Iran mencoba memicu kerusuhan di Afghanistan Barat dan melindungi pejuang al-Qaeda. Washington menduga bahwa Teheran berada di belakang pengiriman senjata menuju ke Jalur Gaza ini ditolak oleh Iran dan Palestina. Dan dukungan Iran untuk Hizbullah dianggap sebagai sebuah pelanggaran di mata Israel dan AS. Karena Hizbullah telah lama dikategorikan oleh AS sebagai organisasi teroris, namun sempat terlihat berada di Lebanon dan di wilayah sekitarnya organisasi ini dianggap sebagai organisasi gerakan pembebasan nasional.

Dengan mengambil tindakan keras terhadap Iran, AS dinilai sejalan dengan pandangan Israel tentang ancaman jangka panjang. Pejabat Israel bersikeras bahwa Iran kurang dari tiga tahun lagi untuk mengembangkan senjata nuklir dan sedang mengembangkan senjata jarak jauh yang bisa mengantarkannya. Ketakutan akan jatuhnya senjata nuklir ketangan para teroris oleh Amerika Serikat serta anggapan Israel akan penggunaan teknologi nuklir ini memaksa AS untuk meninjau kembali kesepakatan nuklir yang telah terjalin dengan pemerintahan Iran.

Pemerintahan Iran sama sekali tidak dapat dipastikan telah atau sedang menjalankan program nuklir militer. Dengan bantuan Rusia, Iran sedang membangun tenaga pembangkit nuklir untuk keperluan sipil. AS menuduh bahwa program sipil tersebut digunakan untuk menyamarkan program senjata nuklir. Ada argumen anti-proliferasi yang kuat untuk mencoba mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, walaupun argumen ini sama-sama berlaku untuk Israel, Pakistan atau India. Iran telah menandatangani Konvensi Senjata Kimia tahun 1997, namun tidak mengumumkan adanya stok senjata kimia atau biologis atau fasilitas produksi senjata berbasis nuklir.

Namun kepentingan AS di Timur Tengah yang berlandaskan *war on terrorism* menilai bahwa Iran terlalu berbahaya apabila dibiarkan untuk tetap mengembangkan potensi energi nuklirnya. Pemerintah Amerika berpendapat bahwa Iran berusaha untuk mendapatkan senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, yang dapat mengancam AS dan sekutu-sekutunya. Bahkan Presiden Amerika pada saat itu mengatakan bahwa Iran secara agresif telah mengejar pembuatan senjata (pemusnah massal) dan mengekspor teror, sementara beberapa pihak menekan harapan rakyat Iran akan kebebasan.

Dalam pandangan politik luar negerinya Amerika Serikat memiliki pandangan juga bahwa dengan dibiarkannya Iran melanjutkan program nuklirnya maka (Rizkt Hadi Alfian, 2015: 59) :

- a. Negara-negara lain di kawasan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Mesir, Suriah, dan Turki akan mengikuti langkah Iran sehingga dikhawatirkan akan timbul perlombaan senjata
- b. Iran dapat memanipulasi harga minyak
- c. Meningkatnya teroris dengan target utama adalah Amerika Serikat, Israel dan negara-negara di Eropa

Hal ini kemungkinan dilandaskan pada adanya keterkaitan antara pemerintah Iran dengan kelompok Mititan Taliban karena dalam satu dekade terakhir Syiah Iran telah terlihat menjalin hubungan dengan Taliban, sebuah kelompok militan Sunni.

Melihat adanya ancaman di Timur Tengah, AS dengan berlandaskan *war on terrorism*-nya mencoba untuk melakukan invasi pada wilayah timur tengah, termasuk Afganistan, Irak, Suriah. Guna meredam kekuatan negara-negara yang menentang invasi AS, Iran sebagai salah satu negara timur tengah yang menentang perlu diredam agar invasi amerika pada kawasan ini dapat berjalan lancar, maka kebijakan kerja sama nuklir dengan Iran perlu ditinjau ulang dan isu senjata pemusnah missal perlu digunakan sebagai cara mengalihkan focus pemerintahan Iran sehingga invasi dapat berjalan tanpa tantangan yang berarti.

Desakan dari Sekutu AS yaitu Israel

Nuklir Iran merupakan program dengan permasalahan yang begitu kompleks, kondisinya yang tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan Amerika Serikat menciptakan banyak perhatian serta mendorong terjadinya beragam konflik. Israel merupakan salah satunya negara yang berada di kawasan Timur Tengah dengan permasalahannya sendiri terhadap negara Iran.

Hubungan antara pemerintahan Iran dengan Israel merupakan salah satu hal yang pelik di Timur Tengah. Setelah berdirinya Israel pada 1948 hingga revolusi Iran pada 1979 ketika dinasti Pahlevi terguling, Israel masih memiliki hubungan baik dengan Iran. Iran dan Israel dianggap memiliki posisi penting dalam memenuhi kebutuhan minyak serta transfer minyak ke pasar Eropa. Namun setelah terjadi revolusi Islam Iran, Iran dan Israel telah menutup jalan aliansi politik antara kedua negara selama Era dinasti Pahlevi menjadi permusuhan seiring kekuatan Ayatollah Khomaeni berkuasa. Saat ini kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik satu sama lain, sebab Iran menarik pengakuan atas Israel.

Pada kasus hubungannya terhadap Palestina, hubungan Iran dan Israel semakin tahun semakin memburuk, hal ini dikarenakan Iran yang telah lama menjalin kerjasama diplomatik dan ekonomi bersama Palestina ikut andil dalam membantu Palestina atas konflik perang yang terjadi di jalur Gaza melawan Israel. Melalui presiden Ahmadinejad, Iran mengklaim sebagai negara yang paling menentang pendudukan Israel atas Palestina dan berupaya agar Israel membebaskan Palestina.

Hal ini terlihat jelas pada pidato Ahmadinejad saat meresmikan kongres IX para menteri luar negeri Asia, peresmian tersebut dihadiri oleh menteri luar negeri Irak, Mesir dan Bahrain, Ahmadinejad mengatakan bahwa negara – negara dunia harus bersatu melawan Israel, seperti yang dilansir kantor berita Iran, Ahmadinejad mengatakan bahwa tantangan yang harus dihadapi oleh negara – negara Islam adalah ancaman dan pendudukan pola pikir terhadap rezim Zionis Israel sebagai pangkal dari semua permasalahan bangsa muslim dunia

Guna memperluas hegemoni nya di Timur Tengah Amerika Serikat pun berusaha untuk melakukan kerjasama terhadap negara-negara yang berada di kawasan ini. Salah satu nya ialah Israel yang merupakan mitra lama kerjasama Amerika Serikat. Sejak jaman kepresidenan Truman, Amerika Serikat telah terlihat memihak kepada pemerintahan Israel dengan ikut andil dalam proses pendirian negara tersebut dan bentuk kerjasama tersebut masih terus berkembang hingga saat ini.

Pada tahun 2006 sendiri pada pertemuan dewan PBB, Duta Israel untuk PBB pernah menyatakan bahwa Iran, Suriah, dan Hamas merupakan poros utam terror (*axis of terror*) dunia berkaitan dengan program nuklirnya.

Kekhawatiran Israel terhadap pencapaian program nuklir Iran yang disebut dapat mencapai pembuatan senjata nuklir memberikan sinyal kepada *American-Israeli Public Affairs Community* (AIPAC) agar segera memberikan lobi terhadap pemerintahan Amerika Serikat untuk terus memantau dan memberikan sanksi yang tegas bagi Iran. AIPAC sendiri ialah merupakan kelompok kepentingan Israel di Amerika Serikat yang didirikan oleh Isaiah Leo Si Kenen pada tahun 1951 masa pemerintahan Eisenhower dan memiliki kurang lebih 100.000 anggota yang tersebar luas di Amerika Serikat saat ini (Mircea Windham, 2010:10).

Salah satu kepentingan AIPAC ialah menghentikan pengembangan program nuklir Iran karena AIPAC merasa bahwa program pengembangan nuklir Iran akan menjadi ancaman bersama negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama bagi Israel yang merasa bahwa teknologi nuklir Iran akan digunakan untuk menyerang Israel.

Kepentingan AIPAC tidak lepas dari upaya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah.

Israel terus menendesak pihak Amerika untuk dapat terus menekan Iran dengan tetap memberikan sanksi atau embargo agar Iran tidak dapat mengembangkan teknologi nuklirnya. Namun pada perkembangannya sanksi ekonomi yang telah diberikan telah diberhentikan, karena Agensi Energi Atom Internasional (IAEA) telah memastikan penggunaan nuklir yang hanya sesuai untuk pengolahan sumber daya energi.

Sanksi yang diberlakukan oleh PBB, AS dan Uni Eropa dalam upaya untuk memaksa Iran menghentikan pengayaan uranium telah melumpuhkan ekonominya, yang menyebabkan negara tersebut menderita kerugian lebih dari \$ 160 miliar pada tahun 2012 saja. Iran berusaha untuk mendapatkan akses ke lebih dari \$ 100 miliar aset yang dibekukan di luar negeri, dan akan dapat melanjutkan penjualan minyak di pasar internasional dan menggunakan sistem perdagangan global. Jika Iran melanggar segala aspek dari kesepakatan tersebut, sanksi PBB secara otomatis akan "mundur" pada tempatnya selama 10 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan lima tahun.

Upaya Penguatan Hegemoni AS di Asia Pasifik

India di anggap sebagai salah satu *rising state* dengan peningkatan pengaruh ekonominya di dunia. Dan juga sebagai salah satu negara yang terlebih dahulu mengembangkan teknologi nuklir.

Pada tahun 1950an, Amerika Serikat membantu India mengembangkan energi nuklir di bawah program Atom untuk Perdamaian. Amerika Serikat membangun sebuah reaktor nuklir untuk India, menyediakan bahan bakar nuklir untuk sementara waktu, dan membiarkan ilmuwan India belajar di laboratorium nuklir A.S. Pada tahun 1968, India menolak untuk menandatangani NPT, mengklaim bahwa hal itu bias. Pada tahun 1974, India menguji bom nuklir pertamanya, yang menunjukkan bahwa mereka dapat mengembangkan senjata nuklir dengan teknologi yang ditransfer untuk tujuan damai. Akibatnya, Amerika Serikat mengisolasi India selama dua puluh lima tahun, menolak kerja sama nuklir dan mencoba meyakinkan negara lain untuk melakukan hal yang sama. Namun sejak tahun 2000, Amerika Serikat telah bergerak untuk membangun "kemitraan strategis" dengan India, meningkatkan kerjasama di bidang-bidang termasuk antariksa, teknologi satelit, dan rudal pertahanan.

Dengan kesepakatan program nuklir tahun 2008 (*U.S – India Civil Nuclear Agreement*), Amerika Serikat membantu India dalam pengembangan lebih jauh energi nuklir untuk tujuan damai dengan membantu melengkapi pasokan energi nuklir terhadap India, dengan melakukan lobi terhadap negara-negara penyuplai nuklir yang tergabung dalam *Nuclear Suppliers Group* (NSG) untuk menyuplai kebutuhan bahan baku reaktor nuklir India. Amerika Serikat juga menegaskan bahwa India harus mengizinkan badan energi atom internasional atau *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk memeriksa lebih banyak reaktor nuklir yang dimiliki India agar tidak di salah gunakan. Kesepakatan ini disetujui walaupun India tidak menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) ataupun *Comprehensive Test-Ban Treaty* (CTBT).

Perjanjian ini juga akan memberikan dampak yang buruk bagi NPT. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi bahwa India merupakan salah satu negara yang menolak menandatangani perjanjian proliferasi nuklir. Sikap umum AS dalam menyikapi program nuklir suatu negara non-NPT adalah penolakan dan kecaman. Contohnya seperti penolakan dan kecaman AS terhadap program nuklir Pakistan dan Korea Utara yang bukan merupakan negara penandatangan NPT. Namun menyikapi program nuklir India, AS mengalami perubahan kebijakan dimana dulunya AS mengecam program nuklir India hingga memberikan berbagai macam sanksi internasional dan embargo ekonomi sedangkan sekarang justru berbalik mendukung program nuklir India.

Rincian kesepakatan meliputi:

1. India setuju untuk mengizinkan pengawas dari Asosiasi Energi Atom Internasional (IAEA), kelompok pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, akses ke program nuklir sipilnya. Pada bulan Maret 2006, India berjanji untuk menempatkan empat belas dari dua puluh dua reaktor daya di bawah pengamanan IAEA secara permanen. India telah berjanji bahwa semua reaktor termal dan peternak sipil masa depan harus ditempatkan di bawah pengamanan IAEA secara permanen. Namun, perdana menteri India mengatakan bahwa India berhak untuk tidak akan dibatasi dengan cara apapun dalam membangun fasilitas nuklir masa depan, baik sipil maupun militer, sesuai dengan persyaratan nasional. Ini berarti bahwa fasilitas militer dan bahan bakar nuklir yang telah diproduksi India akan dibebaskan dari inspeksi atau pengamanan.
2. India berkomitmen untuk menandatangani Protokol Tambahan yang memungkinkan pemeriksaan IAEA yang lebih mendalam terhadap fasilitas sipilnya.
3. India setuju untuk melanjutkan moratorium pengujian senjata nuklirnya.
4. India berkomitmen untuk memperkuat keamanan persenjataan nuklirnya.
5. India bekerja untuk menegosiasikan Fissile Material Cutoff Treaty (FMCT) dengan Amerika Serikat yang melarang produksi bahan nuklir untuk keperluan senjata. India setuju untuk mencegah penyebaran teknologi pengayaan dan pengolahan nuklir ke negara-negara yang tidak memilikinya dan untuk mendukung upaya nonproliferasi internasional.
6. Perusahaan A.S. akan diizinkan untuk membangun reaktor nuklir di India dan menyediakan bahan bakar nuklir untuk program energi sipilnya. (Persetujuan oleh *Nuclear Supplier Group* yang mencabut larangan di India juga telah membukakan jalan bagi negara-negara lain untuk melakukan penjualan bahan bakar dan teknologi nuklir ke India.)

Perjanjian diatas mengarahkan pada kepentingan AS untuk menahan Agressi China di Asia dengan mengizinkan pengembangan teknologi dan produksi nuklir oleh India. Kerjasama pertahanan India dengan Amerika Serikat, merupakan elemen strategi Amerika untuk membatasi kekuatan Beijing yang meningkat. India juga memanfaatkan hubungan strategis dengan Amerika Serikat, dimana pemerintahan India dan AS keduanya memiliki kepentingan geopolitik untuk mencegah dominasi China di Asia Pasifik, dan negara-negara yang mempunyai pengaruh yang sama kuatnya di Asia seperti Jepang.

Para pendukung perjanjian nuklir India-AS ini berpendapat bahwa hal ini akan membawa India lebih dekat ke Amerika Serikat pada saat dimana kedua negara akan menjalin hubungan strategis untuk mengejar kepentingan bersama mereka dalam memerangi terorisme, menyebarkan demokrasi, dan mencegah dominasi Asia dengan kekuatan tunggal. Perkembangan pesat China di kawasan Asia ini mendorong Amerika Serikat untuk menjalin hubungan strategis dengan India. Pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan negara demokrasi terbesar di dunia untuk mengimbangi China. Dengan harapan bahwa dengan *latching onto* India, bisa membantu mereka menangani kebangkitan China.

Sementara India telah menyimpulkan bahwa kerja sama pertahanan dengan kekuatan terkuat di bumi adalah demi kepentingan nasionalnya sendiri, untuk melestarikan keamanannya, mengembangkan industri militer dan kapasitasnya, dan meningkatkan statusnya di Asia Pasifik, Amerika Serikat telah mencapai kepentingannya untuk menahan agresi China di kawasan ini.

Pendekatan AS kepada India merupakan tindak lanjut dari laporan CIA yang mengidentifikasi India sebagai *the key swing state* di abad ke-21. Dalam konteks tersebut, Amerika Serikat bermaksud untuk memperkuat India sebagai bentuk *balancing* terhadap pengaruh China dan negara lainnya di Asia.

Namun meskipun AS memiliki banyak aliansi militer di sekitar China tetap saja AS merasa terancam oleh kebangkitan China. Hal ini dikarenakan basis militer China yang begitu besar jauh mengungguli India dan Jepang sebagai aliansi militer terkuat AS di Asia. Kapasitas angkatan bersenjata (darat, laut, dan udara), kapabilitas senjata-senjata berteknologi tinggi, dan kepemilikan energi nuklir menjadikan status militer China *unchallenged* di Asia. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa China menjalin hubungan kerjasama bilateral yang harmonis dengan Rusia dan Korea Utara sebagai negara penganut komunis-sosialis. Kedekatan secara geografis antara China, Korut, dan Rusia semakin meningkatkan tensi ancaman bagi hegemoni AS di Asia.

Secara militer China didukung penuh oleh Rusia terkait transfer persenjataan dan latihan pasukan gabungan. Sementara Korut memiliki hubungan ketergantungan terhadap China dalam segala bidang. China mendukung penuh atas besarnya pasukan militer dan program pengembangan nuklir Korut. Selain itu China juga merupakan importir utama Korut melalui perdagangan dan bantuan asing. Secara diplomatik hubungan kedua negara juga semakin erat dan harmonis. Kondisi ini menjadi ancaman serius dimana Rusia dan Korut merupakan aktor antagonis bagi Amerika Serikat. Bahkan Korut secara terang-terangan menyatakan bahwa negaranya siap jika terjadi perang nuklir dengan AS. Kapabilitas nuklir eksplosif Korut dengan mudah mampu menghancurkan semua pangkalan militer AS beserta negara-negara aliansinya di Asia yang secara geografis berdekatan. Status China sebagai salah satu negara pemilik nuklir menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas internasional karena kebijakan pengembangan nuklirnya yang tertutup bagi masyarakat internasional. Tidak adanya transparansi dari program pengembangan nuklir China yang semakin berkembang membuat gerah negara-negara tetangga di Asia dan Amerika Serikat sebagai negara hegemon.

Program senjata nuklir China semakin dianggap berbahaya karena China terbukti melakukan transfer teknologi nuklir ke beberapa negara di dunia. China juga mentransfer ilmu dan teknologi pada beberapa program nuklir negara-negara yang diduga mengembangkan program WMD (*Weapon Mass Destruction*) termasuk Iran, Irak, Libya, Korea Utara, dan Syria.

Munculnya India sebagai negara kuat, stabil, demokratik, dan menjadi berpengaruh bagi kepentingan global memiliki potensi untuk meningkatkan efektifitas keamanan dalam sistem internasional. Perkembangan India yang pesat sebagai *rising superpower state* menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah Amerika Serikat sebagai negara hegemon saat ini. India muncul sebagai kekuatan baru di Asia yang telah mengubah konfigurasi kekuatan-kekuatan militer, politik, dan ekonomi di Asia. Pasca perang dingin, kekuatan militer India menjelma menjadi kekuatan militer yang relatif kuat dan besar, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah anggotanya yang mencapai satu juta personil dan dilengkapi dengan peralatan modern dengan industri pendukung, serta anggaran militer yang sangat besar, militer India merupakan salah satu yang terkuat di dunia. Sebagai negara aliansi India, Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dalam segala bidang. Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat telah menjadi negara investor terbesar bagi India sekaligus menjadi mitra dagang terbesar India.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa sikap standar ganda yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah bentuk dari perubahan arah kebijakan Amerika Serikat sesuai dengan progress dan kepentingan nasionalnya pada saat itu. Terlihat pada perubahan kebijakan nuklir Amerika Serikat berkaitan dengan Iran dan India dimana,:

1. Kerjasama nuklir dengan Iran yang berubah haluan setelah terjadinya peristiwa 9/11 dan kebijakan *war on terrorism* diterapkan oleh Amerika Serikat.
2. Desakan dari negara sekutu AS yaitu Israel yang merasa *insecure* dengan pengembangan nuklir Iran merasa terancam berdasarkan sejarah perang yang pernah terjadi dan adanya sentiment Anti-yahudi yang berkembang di negara-negara Islam di timur tengah, memaksa pemerintahan Amerika Serikat untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran karena dikhawatirkan Iran akan meluncurkan senjata nuklirnya apabila teknologi tersebut telah rampung dikembangkan oleh Pemerintah Iran.
3. Sebagai negara dengan potensi yang besar akan perkembangan teknologi dan ekonomi, Amerika Serikat menilai India sebagai negara yang akan memberikan peluang terhadap perluasan hegemoni Amerika di Asia Pasifik, sebagai mitra dalam keamanan dan militer India merupakan negara yang tepat sebagai sebuah *frontier* yang mampu menahan hegemoni China di Asia.

Daftar Pustaka

Buku

- Alfian, H. Rizky. 2015. "*Upaya American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dalam mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat Atas Isu Nuklir Iran*", Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman.

Anthony H. Cordesman, 2000. *“Iran and Nuclear Weapons: A Working Draft”*, Center for Strategic and International Studies

Nye, Joseph S, 1972, *“The Means to Success in World Politics”*. Harvard’s Kennedy School of Government Soft Power : Harvard University Press.

Windham, Mircea. 2010. *“AIPAC : Organisasi Paling Berbahaya di Dunia”*. Yogyakarta: Pustaka Solomon

Internet:

Bajoria, Jayshree. *“The U.S.-India Nuclear Deal”*, yang terdapat dalam <https://www.cfr.org/backgrounders/us-india-nuclear-deal>

Bruno, Greg. *“Iran nuclear program”* yang terdapat dalam <http://www.cfr.org/iran/irans-nuclear-program/p16811>

Pillalamarri, Akhilesh. *“Indias Nuclear Weapon Program”* yang terdapat dalam <http://nationalinterest.org/feature/indias-nuclear-weapons-program-5-things-you-need-know-12697>

Borah, Rupakyoti. *“5 reason Why India Agreed to a Logistic Agreement With the United States”*, yang terdapat dalam <http://thediplomat.com/2016/05/5-reasons-why-india-agreed-to-a-logistics-agreement-with-the-united-states/>